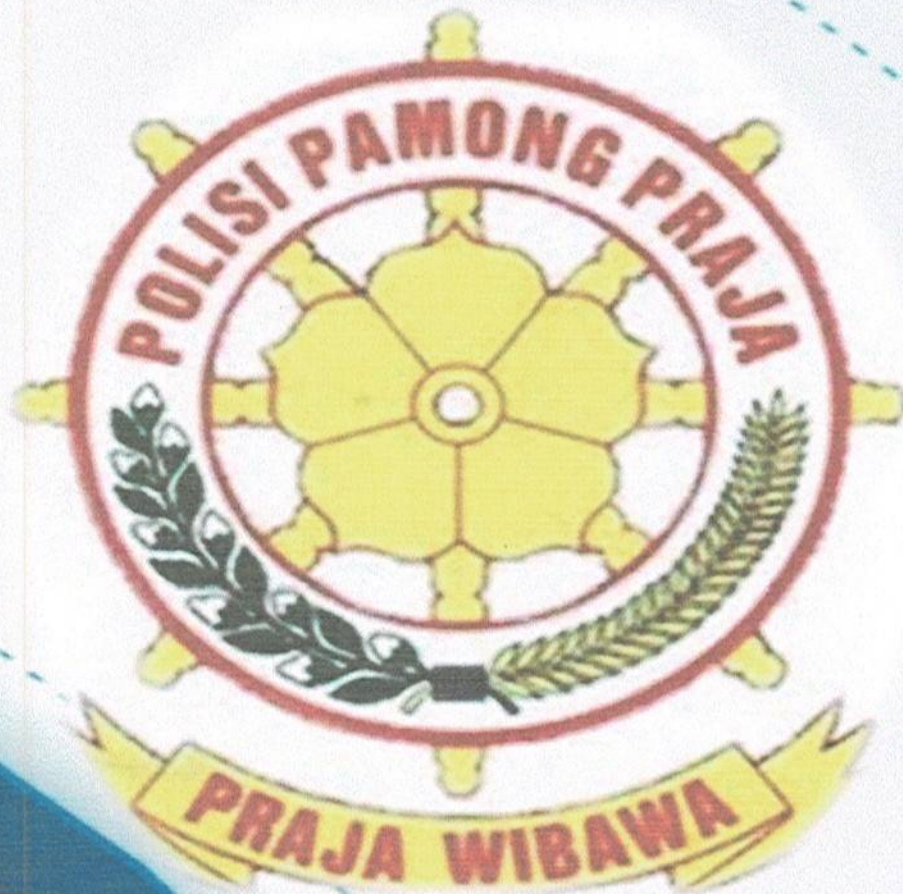


**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Gandanegara No. 29 Telp. (0264) 8393886 Email:
polppurwakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta disusun bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program serta kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga apa yang dikerjakan akan tepat sasaran dan akan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwakarta, 27 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I : Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	12
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	14
3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
3.4. Program dan Kegiatan	16
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	17

BAB V : Penutup 19

Lampiran:

- Matriks Review dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 & 2023.

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna menunjang tujuan utama Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya maka perlu kiranya di tindak lanjuti dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan menjabarkan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan, serta merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah dan Pemerintahan yang tentram, tertib dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai cerminan realisasi tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya, salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparasi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor 503/ /Satpol.PP/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada Tanggal 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) subkegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.976.903.052	4.334.199.926	22
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.347.900	13.323.900	47,0

Rencana Kerja 2024

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.243.900	13.323.900	93,5
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.	14.104.000	0	0,0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.792.841.718	2.507.162.314	21,3
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.785.097.418	2.507.162.314	21,3
2.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	7.744.300	0	0,0
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358.116.100	298.999.300	83,5
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	288.052.500	287.400.000	99,8
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.019.300	8.139.300	81,2
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.044.300	0	0,0
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	50.000.000	3.460.000	6,9
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.413.065	157.624.800	24,5
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.811.000	23.907.000	55,8
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.266.400	0	0,0
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	282.084.700	78.629.800	27,9
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	66.231.500	0	0,0
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.019.465	55.088.000	23,8
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	169.785.800	169.260.000	99,7
1.	Pengadaan Mebel	112.000.000	111.850.000	99,9
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	57.785.800	57.410.000	99,3
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	6.193.098.469	871.659.321	14,1

1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	92.008.733	19.790.333	21,5
2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6.101.089.736	851.868.979	14,0
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	792.300.000	316.170.300	39,9
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	518.900.000	106.763.300	20,6
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	19.800.000	0	0,0
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253.600.000	209.407.000	82,6
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.630.148.250	314.920.200	19,3
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah	1.048.234.650	299.921.600	28,6
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	491.123.650	142.500.000	29,0
2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	152.425.000	40.000.000	26,2
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	210.687.000	102.421.600	48,6
4.	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000	0	0,0
5.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	93.999.000	15.000.000	16,0

2.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	581.913.600	14.998.600	2,6
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	202.765.440	5.393.900	2,7
2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	75.000.000	2.584.700	3,4
3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	304.148.160	7.020.000	2,3
JUMLAH		21.607.051.302	4.649.120.126	22

Dengan Anggaran sebesar **Rp. 21.607.051.302,-** terealisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar **Rp. 4.649.120.126** (22%) sisa yang belum terserap sebesar **Rp. 16.957.931.176,-**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan IKK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel T-C.30 : *(Terlampir)*

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar :

kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target renja perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya administrasi kantor dengan baik	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terperuhnya kebutuhan kelengkapan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terperuhnya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai	100%	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dibutuhkan.	18 Jenis Komponen Instalasi Listrik	-	-	-	-	-	18 Jenis Komponen Instalasi Listrik	100%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga Yang Dibutuhkan	25 Jenis Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	25 Jenis Peralatan Rumah Tangga	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang dibutuhkan	196 buah air galon, 42 dus air mineral gelas, 42 dus air mineral botol, 100 dus makanan dan minuman rapat, 2 paket kecil buah-buah	-	-	-	-	-	196 buah air galon, 42 dus air mineral gelas, 42 dus air mineral botol, 100 dus makanan dan minuman rapat, 2 paket kecil buah-buah	100%
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dibutuhkan	115 HOK Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan 60 HOK Perjalanan Dinas Luar Provinsi	-	-	-	-	-	115 HOK Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan 60 HOK Perjalanan Dinas Luar Provinsi	100%
	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Jasa tenaga PTT yang dibutuhkan	37 org	-	-	-	-	-	37 org	100%
	Penyediaan Jasa Tenaga Picket Malam	Jumlah Jasa Tenaga Picket Malam	3 Org	-	-	-	-	-	3 Org	100%
	Festival Purwakarta Istimewa	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Penyediaan Jasa Tenaga Pembantu Satpol. PP	Jumlah jasa tenaga pembantu satpol pp yang dibutuhkan	94 Org	-	-	-	-	-	94 Org	100%
	Pengamanan Khusus	Jumlah Lokasi Dan Personil Pengamanan Khusus Bupati, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Bupati Yang Dibutuhkan	13 Petugas Unsur Satpol PP, 13 Petugas Unsur External, 3 Lokasi	-	-	-	-	-	13 Petugas Unsur Satpol PP, 13 Petugas Unsur External, 3 Lokasi	100%
	Pengadaan alat-alat perlengkapan dan perlindungan	Jumlah Pengadaan Alat-Alat perlengkapan dan Perlindungan Yang	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Item Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Yang dibutuhkan	8 Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	8 Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%
	Pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah item pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang dibutuhkan	23 Jenis pemeliharaan gedung dan kantor	-	-	-	-	-	23 Jenis pemeliharaan gedung dan kantor	100%

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Item Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Yang di Pelihara	15 Unit Kendaraan Roda 4						15 Unit Kendaraan Roda 4	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah item pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	50 unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor						50 unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100%
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Yang Di Butuhkan	1 Paket						1 Paket	100%
	Pengadaan perlengkapan huru-hara	-	-						-	-
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga Yang Di Butuhkan	1 Paket						1 Paket	100%
	Pengadaan pakaian kerja Khusus	Jumlah pengadaan pakaian khusus Yang Dibutuhkan	30 Pakaian satgasus						30 Pakaian satgasus	100%
	Pengadaan Alat-alat Bantu Pengamanan	Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana bagi pegawai	-						-	-
	Pengadaan piang peringatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah	-						-	-
	Pengadaan Piang Barikade	Meningkatnya kualitas pengamanan	-						-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	10 buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						10 buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Item laporan keuangan akhir tahun yang dibutuhkan	20 buku laporan keuangan akhir tahun						20 buku laporan keuangan akhir tahun	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan	Meningkatnya kualitas pelaporan hasil kegiatan	-						-	-
	Penyusunan Rencana Strategis	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan	-						-	-

	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Laporan Rencana Kerja SKPD yang disusun	10 Buku Rencana Kerja SKPD	-	-	-	-	100%
	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	2 dokumen	-	-	-	-	100%
	Laporan Penyusunan SPIP SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Intern Pemerintahan PD Yang Disusun	1 Dokumen Laporan SPIP PD	-	-	-	-	100%
	Laporan Penyusunan LPPD SKPD	Jumlah Dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD yang disusun	10 Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD	-	-	-	-	100%
	Laporan Penyusunan SPM SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SKPD yang disusun	10 Buku Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal PD	-	-	-	-	100%
	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Presentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	100%	-	-	-	-	100%
		Presentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang Tertangani	100%	-	-	-	-	100%
	Studi Komperasi Penegakan Perda	Terjalinnnya koordinasi penegakan Perda Kabupaten Purwakarta		-	-	-	-	

	Monitoring Pelanggaran PERDA/PERKADA di Kabupaten Purwakarta	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelanggaran PERDA/PERKADA di Kabupaten Purwakarta	31 Kegiatan	-	-	-	-	-	31 Kegiatan	100%
	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Yustisi dan Non Yustisi)	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda/Perkada (Yustisi & Non Yustisi) di Kab. Purwakarta	10 Kegiatan	-	-	-	-	-	10 Kegiatan	100%
	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	4 Kegiatan	100%
	Penyusunan Dokumen Hasil Penyelidikan terhadap Pelanggaran Perda/Perbup.	Tersedianya dokumen hasil penyelidikan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNS	Jumlah Peserta Kegiatan PPNS di Kabupaten Purwakarta	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan, 11 Orang	100%
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketramtaman Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/ Penertiban Tramtmbas	34	-	-	-	-	-	34	100%
		Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	8	-	-	-	-	-	8	100%

